

Pasah Harati
Eka Maingkes
Binyi Hasien

Hidup Segan
Mati Tak Mau
Setahun Food Estate

Gonta Ganti
Perusahaan Tambang
di Sumur Mas

PANUTUNG TABUNG

Mampalawa Bulan Matanandau Pambelum Utus

Edisi 9 Maret - April 2022

EKSKLUSIF

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kehutanan dan Perhubungan

EKSKLUSIF

Ketua Aliansi
Masyarakat
Gunung Mas



**JALAN KURUN - PALANGKA RAYA RUSAK
TANGGUNG JAWAB SIAPA ?**

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Yanedi Jagau

Pimpinan Redaksi

Didik Gunawan

Koordinator Redaksi

Kusni Sulang

Koordinator Liputan

Standy Christianto

Anggota Redaksi

Destano Anugrahnu

Paulus Sukirwanto

Luthfi Bakthiar

Rodi

Pebri Ayu Lestari

Ary Prasetyo

Tim Marketing&administrasi, Langganan, Distribusi

Andi Kristianto

Fika Dian Nuranita

Melina Kristiani

Alamat Redaksi

Yayasan Borneo Institute
Jl. Sangga Buana II Selatan
No.63 Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah,
Indonesia

Email

info@borneoinstitute.org



Panutung Tarung edisi 9 ini memberikan banyak perubahan kembali, mulai dari teknis tata cara pengambilan berita, manajemen liputan dan editor yang kembali memperbaharui pantung tarung menjadi lebih baik pada setiap edisi.

Pembelajaran ini sangat penting untuk kami meskipun dalam kondisinya masih menyisakan keterlambatan pada edisi ini. Kami belum menyerah untuk belajar menjadi media independen, profesional dan menjadi penyalur suara-suara dan aspirasi masyarakat di Kalimantan Tengah.

Topik pada edisi kali ini mengenai kerusakan jalan yang ada di sepanjang Palangka Raya - Kuala Kurun. Isu ini cukup panjang bergulir dari akhir tahun 2021 hingga 2022, menarik untuk dibahas karena jalan tersebut merupakan jalan umum dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar swasta untuk kegiatan mengangkut seperti batubara, kelapa sawit dan kayu.

Jalan rusak membuat aliansi masyarakat Gunung Mas melakukan unjuk rasa di gedung Bupati Gunung Mas dan di depan kantor DPRD Provinsi, hasil dari demo tersebut membuahkan hasil adanya aliansi konsorsium perusahaan besar swasta yang akan bertanggung jawab memperbaiki jalan. Nyatanya tim panutung tarung pada bulan maret 2022 melihat perbaikan jalan hanya ditimbun dengan tanah dan pasir saja.

Topik lainnya yang tidak kalah menarik tentang perkembangan nasib food estate yang ada di desa Tewai Baru, proyek yang sudah mengeluarkan dana milyaran rupiah dan pembukaan lahan ratusan hektar terbengkalai begitu saja.

Bacaan tak kalah seru lainnya tentang desa Sumur Mas. Desa tersebut telah banyak menarik minat perusahaan-perusahaan tambang silih berganti mencari emas, menariknya di kawasan desa tersebut ada goa dan cerobong asap peninggalan Belanda. Peninggalan tersebut harusnya menjadi cagar budaya di wilayah tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat desa Sumur Mas.

Tidak lupa informasi seputar desa masih menjadi ciri khas Panutung Tarung untuk terus memberikan aspirasi dari masyarakat.

Edisi ini kami berusaha menyajikan berita yang lebih mendalam sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca sekalian. Selamat membaca.

DAFTAR ISI

Dari Redaksi

02

LIPUTAN KHUSUS

10



**Kelebihan Muatan berbahaya
bagi Sopir dan
Pengguna Jalan Lainnya**

LIPUTAN KHUSUS

12

**SOSOK PENGAWAL
ASPIRASI PENGGUNA RUAS JALAN
PALANGKARAYA - KUALA KURUN**

LIPUTAN KHUSUS



**Truk kelebihan muatan batubara sawit dan kayu
mengancam keselamatan pengguna jalan umum
Palangkaraya-Kuala Kurun**

06

TAJUK RENCANA - Hlm. 4

Kendaraan angkutan PBS (Perusahaan Besar Swasta) masih berlalu-lalang di jalan umum becek dan berlubang. Aliansi PBS yang bertujuan untuk memperbaiki jalan telah dibentuk dengan menggunakan dana yang tidak sedikit. Perbaikan jalan sementara hanya ditimbun dengan tanah yang kemudian akan dilanjutkan pada proses penimbunan yang dibuat dari cement treated Base (CTB) setelah itu baru masuk proses pengaspalan.

OPINI

16

**"PROYEK RAKSASA"
PEMBANGUNAN JALAN
DI TANAH BORNEO**

DOKUMENTASI BIT 14

DOKUMENATSI BIT 22

OPINI

18

**KERUSAKAN JALAN:
ANTARA PENEGAKAN
ATURAN DAN MAIN MATA**

INFORMASI

20



**Hidup Segan Mati Tak Mau, Setelah Setahun
Food Estate, Batang Singkong Tumbuh Selutut
di Tanah Granit Berkerikil**

INFOGRAFIS

13

INFORMASI

24



**Gonta Ganti Perusahaan Tambang di Sumur
Mas Sejak Kolonial Hingga Masa Kini**

KABAR LEWU

28

Pasah Harati Eka Maingkes Binyi Hasien

Kikik-kakak tatawen uluh are mananture tuntang manampayah ampin karamin acara. Tege je mangarungut, badeder tuntang manasay. Sukup simpan ampin kare penampilan te. Metuh lasut andau tempak hunjun kuluk, Sabtu 20 November 2021 ikey manampa acara peresmian Pasah Harati.

INFORMASI

26

**Bakal Cagar Budaya Tambang Mas
Peninggalan Kolonial Belanda dan Jepang
Goa Wilhelmina di desa Sumur Mas**

RUANG KEBUDAYAAN 30



Truk kesulitan melewati jalan di jalan Kuala Kurun – Palangka Raya
/20 februari 2022/foto BIT/Pebri Ayu Lestari

MASIH MENUNGGU **KELAYAKAN JALAN UMUM** PALANGKA RAYA – KUALA KURUN

Didik

Kendaraan angkutan PBS (Perusahaan Besar Swasta) masih berlalu-lalang di jalan umum becek dan berlubang. Aliansi PBS yang bertujuan untuk memperbaiki jalan telah dibentuk dengan menggunakan dana yang tidak sedikit. Perbaikan jalan sementara hanya ditimbun dengan tanah yang kemudian akan dilanjutkan pada proses penimbunan yang dibuat dari cement

treated Base (CTB) setelah itu baru masuk proses pengaspalan. Salah satu yang mendorong aliansi PBS itu terbentuk lantaran Bupati Gunung Mas marah-marah secara terbuka kepada perusahaan yang menggunakan kendaraan melebihi muatan pada jalan umum Kuala Kurun-Palangkaraya. Pemerintah daerah Gunung Mas melalui dinas terkait juga sudah melakukan pengawasan, bahkan melalui dinas

perhubungan telah memberitahu sopir-sopir truk tandan buah sawit agar tidak melebihi kapasitas muatan (tulisan ini ditulis). Jalan umum sepanjang 154 Km yang terbentang dari Jembatan Kahayan Kota Palangka Raya – Kuala Kurun dengan 2 kabupaten (Pulang Pisau, Gunung Mas) dan 1 kota (Palangka Raya) menjadi perhatian penting masyarakat luas, terlebih bagi kami tim panutung tarung. Kondisi jalan yang baik tentu dapat mengembangkan dan meningkatkan pembangunan suatu wilayah. Kondisi jalan yang rusak dapat mengancam keselamatan warga masyarakat pengendara umum yang setiap harinya melintas.

“

**JANGAN SAMPAI PERBAIKAN JALAN
YANG DIKERJAKAN ALIANSI PBS
GUNUNG MAS SEBAGAI PEMBENARAN
BAGI MEREKA UNTUK UGAL-UGALAN
MENGANGKUT HASIL BUMI DENGAN
MUATAN YANG BERLEBIHAN
DIJALAN UMUM**

Kerusakan jalan Palangka Raya – Kuala Kurun memang ada di beberapa titik saja seperti di desa Rangan Tate, Tumbang Empas, Tanjung Karitak dan Pemantang Lima tetapi dengan adanya beberapa perusahaan seperti Tambang Batu Bara, Kelapa Sawit dan Kayu dapat memperparah kondisi jalan yang sebelumnya rusak menjadi lebih rusak lagi, belum lagi jika kita berbicara tentang aturan Batasan muatan kendaraan PBS yang seharusnya maksimal 8 ton. Tim Panutung tarung telah terjun langsung kelapangan untuk melihat situasi sebenarnya dengan mencari fakta-fakta yang ada. Di beberapa desa seperti

Rangan Tate kami melihat banner berisi tulisan-tulisan sindiran seperti “Jalan Laju ! debu bikin kami marah” atau “Kurangi kecepatan Anda karena kami sudah kenyang menghirup debu” ini merupakan indikasi protes secara tidak langsung oleh masyarakat sekitar yang tinggal menetap pada kiri kanan jalan bahkan dalam salah satu rambu lalu lintas tentang Batasan muatan 8 ton dicoret oleh masyarakat menjadi 80ton, adalah sindiran bukan saja masyarakat sendiri dan pengusaha namun juga pemerintah. Konsorsium PBS yang telah dibentuk dengan segera bekerja untuk penyelesaian kerusakan jalan, pada kunjungan tim kami ke perusahaan DMP dan HPL belum membuahkan hasil meskipun beberapa cara sudah dilakukan seperti mengirim surat permintaan wawancara dan berkunjung langsung. Meskipun demikian konsorsium PBS



Salah satu keluarga di desa Pematang Limau sedang menimbun jalan yang rusak dengan batu bara yang tercecer dipinggir jalan/12 Maret 2022/foto BIT

116.411 dan 30% didalamnya akibat faktor prasarana dan lingkungan. Dari data BPS tentang pembelian kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya pada tahun 2017 total sejumlah 118.922.708 yang terdiri dari mobil penumpang, mobil bis, mobil barang dan

berharap perbaikan jalan dapat diselesaikan segera. Masyarakat yang telah membayar pajak mestinya berhak mendapatkan jalan umum yang mulus dan nyaman untuk dilalui. Jalan umum mestinya tidak boleh dicampur adukkan dengan kegiatan khusus transportasi komoditi perusahaan. Secara undang-undang pengaturan transportasi perusahaan yang mengeruk sumber daya alam batubara, sawit dan kayu sudah jelas disebutkan bahwa jalan produksi perusahaan mesti khusus dan terpisah dari jalan umum, ini semua demi keselamatan warga masyarakat. Jangan sampai kendaraan pengangkutan akan menjadi horor yang menghantui masyarakat, dan mengancam keselamatan berkendara. Nampaknya Pemerintah, Legislatif, Dinas Terkait, Pengusaha dan Masyarakat, mesti duduk bersama agar jalan Kurun – Palangkaraya layak dan mulus, agar pembangunan wilayah desa, kota dan kabupaten makin maju dan lancar.

Editor : YJ



Spanduk di pinggir jalan desa Rangan Tate/10 Maret 2022/foto BIT

harus bertanggung jawab sampai akhir, jangan hanya berhenti pada penimbunan saja. Berdasarkan data BPS jumlah kecelakaan dari tahun 2017,2018, 2019 meningkat dari 104.327, 109.215 hingga

sepeda motor kemudian pada tahun 2020 menjadi 136.137.451. Berdasarkan data-data diatas tentu potensi terjadinya kecelakaan menjadi hal utama. Untuk itu kami





Truk mengangkut sawit terguling dipinggir jalan Kuala Kurun – Palangkaraya/10 Maret 2022/foto BIT

TRUK KELEBIHAN MUATAN BATUBARA SAWIT DAN KAYU MENGANCAM KESELAMATAN PENGGUNA JALAN UMUM PALANGKARAYA-KUALA KURUN

Andi, Fika, Standy, Didik

Kerbau, gerobak, sepeda tinjak, mobil penumpang, truk pengangkut barang roda empat hingga truk trailer 22 ban punya hak untuk lewat. Jika air sungai Kahayan naik, puluhan ekor kerbau menyeberang jalan lintasan jalan Kurun–Palangkaraya di desa Kampuri dan Rangan Tate. Hewan dan ternak hilir mudik lewat jalan tersebut ditambah lagi hasil bumi, sawit, batu bara dan pasir zircon bahkan kayu gelondongan boleh diangkut menggunakan kendaraan berpuluh-puluh roda. Truk sarat muatan batu bara, sawit dan kayu gelondongan berjatuh di jalan raya berlobang di Desa Rangan

Tate, tiga bahkan empat truk yang beriringan terpaksa berhenti. Antrian panjang kendaraan mengular. Tangan kiri Tari (45) berkecak pinggang, sembari tangan kanannya menunjuk kubangan lumpur di tengah jalan, perempuan paruh baya ini berkata: “Truk batubara yang terjebak di lumpur harus diangkat agar orang lain dapat melewati jalan tersebut. Kasihan masyarakat baik kaya atau miskin semua melewati jalan ini. Kalau kalian melewati jalan ini membawa barang berat seperti batubara, sawit apalagi kayu log, aku kasih tau ya untuk sopir, sejak awalnya jalan ini tidaklah rusak, tetapi sejak truk

membawa muatan berat maka rusaklah jalan ini”. Hari itu hari pertama tahun baru 2022, awan bergulung-gulung hitam di Desa Rangan Tate, cuaca mendung disertai hujan rintik-rintik seakan mengaduk-aduk tanah becek bercampur pasir dan kerikil pada jalan raya lintasan Kuala Kurun ke Palangkaraya. Tari menetap di desa Rangan Tate, Kabupaten Gunung Mas, warga desa kerap memanggilnya dengan sebutan Indu Rio, panggilan akrab menggunakan bahasa Dayak Ngaju yang berarti Mamah Rio, lantaran Tari memiliki anak sulung bernama Rio. Rusaknya jalan berpengaruh langsung terhadap usaha dagang



Aliansi masyarakat Gunung Mas melakukan unjuk rasa terkait kerusakan jalan Kuala Kurun – Palangka Raya, Kamis (16 Desember 2021) foto dok.tribunkalteng.com

minuman dan makanan Indu Rio, warung itu menghadap jalan raya, sekitar tujuh meter jarak warung dengan jalan raya. Tari menyediakan ruang parkir yang lega di halaman warung tersebut. Kalau kita berkendara mobil datang dari arah Palangkaraya menuju ke Kuala Kurun, akan kita temui warung Tari pada sebelah kiri. Berkali-kali truk terbalik di depan warung Indu Rio. Supir truk hilang kendali lantaran kondisi jalan sudah rusak berat. Lapisan aspal sudah menipis, kerikil dan pasir beterbangan sewaktu truk melaju. "Pada tahun baru satu Januari lalu jalan raya seperti kubangan kerbau, becek dan beberapa truk terperosok lumpur, ada yang muatannya tumpah, terdapat dua truk yang bermuatan batubara-nya tumpah, dan menutup jalan, akhirnya mobil macet dalam antrian" Ujar Tari. Kerusakan jalan raya juga menyulut

protes dari warga berbagai desa di gunung Mas. Yepta Diharja koordinator Aliansi Masyarakat Gunung Mas mengajak warga desa mengangkat kasus kerusakan jalan tersebut agar mendapat perhatian semua pihak. "Karena itu masyarakat membentuk organisasi yang diberinama Aliansi

“ JALAN UMUM MERUPAKAN FASILITAS BAGI SEMUA ORANG BUKAN HANYA UNTUK PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR SWASTA

Masyarakat Gunung Mas, ini spontan dan saya memimpin agar ada yang memimpin" Menurut Yepta, jalan raya rusak parah terjadi di Desa Pematang Limau, Rangan

Tate, Tumbang Empas dan Tanjung karitak. Ratusan warga desa atas nama AMGM berunjuk rasa pada 16 Desember 2021 di halaman kantor DPRD Kalteng. Yepta membacakan tuntutan AMGM yang berisikan penolakan masyarakat terhadap penggunaan jalan umum untuk mengangkut batu bara, kelapa sawit dan kayu gelondongan. Usai unjuk rasa di kota Palangkaraya, aksi protes warga berpencar ke tingkatan desa di Gunung Mas, Tuntutan warga desa makin menguat diiringi pula dengan aksi blokade jalan pada beberapa tempat. Unjuk rasa AMGM Pada 5 Januari 2022 di desa Tanjung Karitak, AMGM meminta agar truk pengangkut hasil bumi tidak boleh melewati jalan umum, walaupun diberikan hak lewat itupun hanya setahun dan sesuai aturan yang berlaku. Tuntutan AMGM diterima Kapolres, DPRD dan Bupati GUMAS Jaya Monong,

tak tampak satu pun wakil perusahaan. Jalan Raya Kurun Palangkaraya adalah jalan propinsi yang urusannya pada tingkat ke gubernuran Kalteng. Pemerintah provinsi Kalteng dalam berbagai kesempatan menyatakan tidak ada anggaran dari pemerintah

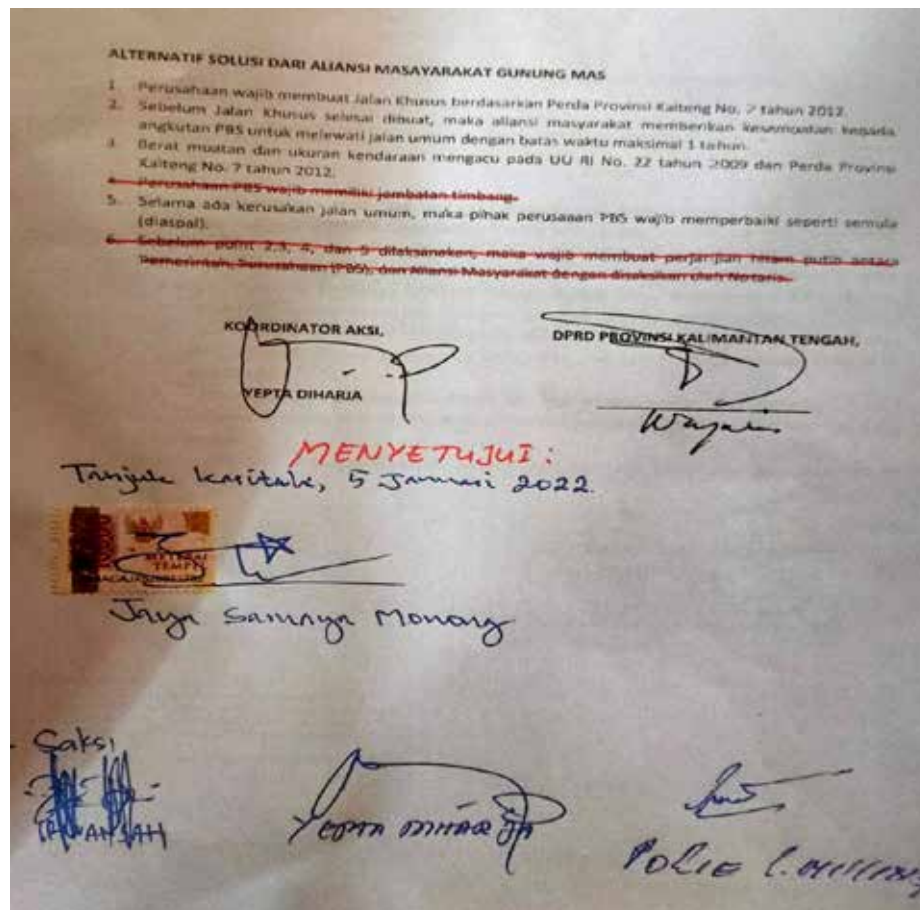
“

URUNAN DUIT UNTUK MEMPERBAIKI JALAN

nasional maupun daerah provinsi untuk perbaikan jalan Palangkaraya-Kurun. Bupati sesungguhnya tidak memiliki banyak kewenangan untuk perbaikan jalan tersebut, namun fakta di lapisan desa umumnya warga memahami jalan kurun adalah urusan Bupati. Jaya sudah terlanjur berjanji pada 5 Januari 2022, yang intinya ia akan memenuhi tuntutan masyarakat agar truk pengangkut barang yang melebihi muatan 8 ton dilarang lewat. Namun teriakan protes masyarakat dianggap sepi oleh banyak perusahaan batubara, sawit dan kayu. Imbau-mengimbau saja tidak mempan untuk memelihara jalan raya. Alat untuk menertibkan angkutan jalan raya sesungguhnya telah tersedia. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 dan Perda Provinsi kalteng nomor 7 tahun 2012, namun faktanya aturan dilanggar. Kesabaran Bupati Jaya Monong nampaknya sudah pada titik nadir. Tengah malam memasuki pagi buta, 29 Januari lalu, Desa Pematang Limau masih gelap gulita, jam menunjuk angka satu. Bupati

Gunung Mas Jaya Monong inspeksi mendadak di jalan raya seputar Desa Pematang Limau, kegiatan tersebut tersebar luas dan disiarkan melalui video live di Facebook. Bersama para pengawalinya beberapa polisi dan dinas perhubungan gunung Mas, Jaya menghentikan kendaraan yang mengangkut Kayu log. Jaya tak mampu menyembunyikan mimik wajah geram dan marah, ia sadar aura wajahnya disorot di depan umum melalui facebook dan youtube. “Saya ngga ada urusan dengan supirnya, saya berurusan dengan pemiliknya saya minta pemilik PT HPL ini (PT. Hutan Produksi Lestari) segera menemui saya, dan saya tunggu, dan ini (mobil) ngga usah jalan, tetap disini aja.” Ujar Jaya Menggunakan topi hijau dan mimik wajah marah Jaya berkata “Ini nda ban 10

lagi, ini 22 ban. Ini udah ngawur muatannya, logging ini, masa logging lewat jalan umum, ini kelihatan PT. HPL masih bandel, tidak ikuti aturan, sekarang jam 1 dinihari tanggal 29 januari 2022, ini truk yang mengangkut logging, bannya jumlahnya 22, dan 2 truk, ini milik PT Hutan Produksi Lestari, ini keterlaluhan, masih bandel, saya minta pemiliknya menghadap saya, saya minta tanggung jawabnya memperbaiki jalan Palangkaraya-Kuala Kurun, yang melintasi Gunung Mas. Gebrakan Jaya untuk sementara waktu mampu menghentikan aktivitas pengangkutan hasil bumi yang ugal-ugalan. Satu demi satu perusahaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi di Gunung Mas dipanggil oleh Bupati untuk memperbaiki jalan, Bupati



Kesepakatan bersama perihal alternatif solusi untuk perbaikan jalan Palangka Raya - Kuala Kurun setelah aksi demo di DPRD Provinsi/29 Januari 2022/foto BIT



Salah satu rumah warga di desa Rangan Tate ditutup plastik pada depan rumah agar debu dari jalan raya tidak masuk ke rumah/12 Maret 2022/foto .BIT

pun memilah PBS berdasarkan jenis hasil bumi batubara, sawit dan perkayuan. Kerusakan jalan tidak semua ditimpakan kepada supir truk, porsi tanggung jawab tentu saja ada pada PBS yang membiayai pengiriman hasil bumi itu. Utuh, 41 tahun, supir truk, dua as roda dengan jumlah total 6 ban, kapasitas angkut sampai 10 ton. Pria asal Sakumpul Martapura ini sudah setahun hilir mudik mengantar batubara PT. Dayak Membangun Pratama (DMP), PT. Tajahan Antang Mineral, PT. Sembilan Tiga Perdana (STP) dan lain-lain. Utuh mengatakan “Kalo mobil truk ini mengambil isi bebas saja mengangkut dari perusahaan mana, ada 4 perusahaan yang ada di gunung mas. TAM, STP, DMP, upahnya Rp.225 ribu per ton, mobil ini muatannya 9 ton kalau juwung (sarat) bisa sepuluh ton”. Bupati Gunung

Mas menunjuk PT. DMP sebagai koordinator yang mewakili PBS batubara untuk urusan duit memperbaiki jalan raya yang mereka gunakan untuk mengangkut hasil alam. Koordinator AMGM aktif menghubungi Bupati agar terus mengawal tuntutan masyarakat berkenaan perbaikan jalan. Lebih lanjut Yepta mengatakan “Perbaikan jalan ini nampaknya diborongan pekerjaannya ke kontraktor. Biaya perbaikan diperkirakan 25 Milyar, perusahaan yang bergotong royong mengumpulkan dana, berdasarkan kesepakatan beberapa waktu lalu, selain itu dalam kesepakatan disebutkan mereka diberi kesempatan satu tahun untuk melewati jalan ini” Panutung Tarung (Pantung) menelpon PT. DMP. Dan mengajukan permintaan wawancara. Telepon tidak dijawab. Selanjutnya Pantung juga

menelpon PBS wakil bidang Perkayuan, yaitu PT. HPL, tapi tidak ditanggapi. Komisaris dan Direktornya tidak menjawab panggilan telepon. Reporter Pantung meminta waktu untuk wawancara juga tidak mereka ladeni. Dana untuk perbaikan jalan yang berasal dari dana perusahaan, bukan berasal dari APBD dan APBN. Uang PT, DMP berasal dari milik mereka sendiri. Idealnya puluhan bahkan ratusan milyar dana dibutuhkan agar jalan raya Kurun-palangkaraya mulus layak dilewati. Belum ada kabar dari PT. DMP, bagaimana nasib pengelolaan dana swasta untuk perbaikan jalan itu. Semoga angkutan truk batubara dan sawit serta kayu tak lagi mengancam keselamatan pengguna jalan umum di lintasan padat Kurun – Palangkaraya.

Editor : YJ



KELEBIHAN MUATAN **BERBAHAYA** BAGI SOPIR DAN PENGGUNA JALAN LAINNYA

Wawancara Dengan Yohanes Tuah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas

Didik, Luthfi, Rodi

Panutung Tarung menemui Yohanes di kantornya, namun ia disibukkan oleh kegiatan merancang perda Masyarakat Hukum Adat. Beliau meminta kami agar wawancara tertulis saja. Dia menyuguhkan teh kotak, menerima kami dengan hangat, pria murah senyum dan berambut perak ini berjanji mengirim jawaban wawancara tertulis. Nama lengkapnya Yohanes Tuah, bergelar sarjana insinyur dan menempuh master pada ilmu yang eksak. Berikut ini petikan wawancara tertulis kami bersama pria paruh baya ini.

Bagaimana Pendapat Dinas Perhubungan Kab. Gunung Mas mengenai Aliansi Masyarakat Gunung Mas, tanggal 5 Januari 2022 dan Bagaimana Peranan Dinas Perhubungan dalam mengawal hasil Penandatanganan Oleh Bupati, DPRD, dan Aliansi Masyarakat Adat?:

Yang Pertama kami meluruskan terkait Perhubungan, untuk Perhubungan sendiri sekarang bergabung mulai awal Januari tahun 2020, Menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan atau disingkat DLHKP Kabupaten Gunung Mas, dan Perhubungan Sendiri sekarang Menjadi Bidang. Pada Prinsipnya Kami Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas melalui DLHKP Mendukung dan sepakat apa yang menjadi tuntutan Aliansi Masyarakat Gunung Mas,



Yohanes Tuah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan (DLHKP) Gunung Mas/10 Maret 2022/foto mediadayak.id

dan keempat point tersebut sudah jelas dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Apa tindakan lanjutan atau antisipasi yang akan dan sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai pihak pengawas yang berkompeten untuk menertibkan moda transportasi darat yang kelebihan muatan (Truk, bis) yang melintas masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas?

Kami dengan Bapak Bupati Gunung Mas dan Stakeholder lainnya seperti Kepolisian, TNI dan Satpol PP, sudah melakukan Pengawasan Angkutan PBS yang dilaksanakan kurang lebih satu bulan (5 Januari s.d. 27

Januari 2022) untuk meminta partisipasi perbaikan jalan kepada seluruh angkutan PBS yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas dan sekaligus Sosialisasi ODOL (Over Dimension Over Loading atau Kelebihan muatan kendaraan) dan setelah ada kesepakatan dengan pimpinan PBS mereka semua menyangupi dan setelah itu berdasarkan kewenangan jalan untuk ruas Kuala Kurun – Bawan dan Bukit Liti adalah Jalan Provinsi dan untuk Ruas Bukit Liti – Bukit Rawi dan Palangka raya adalah ruas jalan nasional. **Apa tanggapan dari Dinas Perhubungan mengenai Rambu Lalu Lintas yang dicoret dari 8 (delapan ton menjadi delapan puluh (80) ton antara lintasan Palangka Raya – Kuala Kurun?**

Terkait pencoretan rambu sudah dilaporkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, berhubung terkait aset dan menjadi kewenangan Provinsi yang melakukan pemasangan dan pengadaan. Kami juga tidak tinggal diam bekerjasama dengan kepolisian setempat dan masyarakat untuk mencari oknum yang tidak

bara yang kami temukan sepanjang jalan dari Palangka Raya menuju Kuala Kurun pada tanggal 10 Maret 2022?

Tanggapan kami, pada saat melakukan pengawasan angkutan PBS di awal Januari 2022 kami terus mengingatkan dan menegur para sopir dan pemilik angkutan untuk tidak membawa angkutan yang

terutama masyarakat di Wilayah Kabupaten Gunung Mas? Adakah masukan dari pihak Dinas Perhubungan untuk membantu permasalahan kerusakan jalan?

Untuk Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas di Ruas Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil



Terlihat jalan hanya ditimbun, genangan air habis hujan memperparah kondisi jalan/12 Maret 2022/foto BIT

bertanggung jawab. Sesuai dengan Pasal 275 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. "Perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan merusak pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan dapat dipidana kurungan 1 (satu) bulan dan denda maksimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)"

Bagaimana tanggapan dari Dinas Perhubungan terkait banyaknya kendaraan truk yang terguling dan dugaan tercecernya muatan batu

melebihi dari ketentuan dan aturan yang ada. Belum ada kesadaran sepenuhnya dari semua sopir angkutan, khususnya angkutan yang melintas di ruas Kuala Kurun Palangka Raya, terkaitnya kelebihan muatan dengan alasan klasik mengejar setoran tanpa mengutamakan keamanan dan keselamatan di jalan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPTD Wil.XVI Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan giat Gakkum dan dari hasil koordinasi mereka siap untuk giat dimaksud.

Apakah Perda Provinsi dan Kabupaten masih relevan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan darat

Produksi Pertambangan dan Perkebunan. Masih Relevan dan sesuai dengan amanat undang-undang yang di atasnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Masukan dari kami adalah tetap berkoordinasi dan mendorong Pihak Provinsi Kalimantan Tengah agar bersama-sama Kabupaten Gunung Mas, untuk bersama-sama melakukan penertiban dan penegakan hukum gabungan dan juga mendorong serta menghimbau kepada Semua Pemilik PBS yang ada di Wilayah Gunung Mas agar berpartisipasi dalam bebas ODOL 2023.

Editor : YJ



Yepta Diharja,

SOSOK PENGAGAS ASPIRASI PENGGUNA RUAS JALAN PALANGKARAYA - KUALA KURUN

Andi

Koordinator Aliansi Masyarakat Gunung Mas, Yepta Diharja mengawal hak masyarakat pengguna jalan Kurun – Palangka Raya. Sehari-hari Yepta bekerja pada credit union Kuala Kurun, ia mendampingi petani karet, selain itu mengajak warga membuat kolam di pekarangan rumah. Ia menekuni aktivitas yang beragam, mulai dari teman berkonsultasi warga menyangkut berbagai hal, urusan karet, ikan bahkan jika ada warga yang sakit perut dan demam pun terkadang ia juga ikut campur. Begitulah kehidupan Yepta sebagai aktivis di kota yang masih bersuasana desa. Secara administratif Kuala Kurun adalah kota kabupaten, namun wilayahnya yang luas juga terdapat suasana perdesaan yang kental di tempat yang mayoritas dihuni oleh warga Dayak Ngaju. Masalah jalan raya yang rusak pun tak luput dari perhatian pria lulusan Sosial Ekonomi pada Universitas Palangkaraya. Lelaki yang bernama lengkap Yepta Diharja secara usia masih terbilang muda berumur 42 tahun. Ia kategori pemuda yang senang berinisiatif menggalang potensi masyarakat. Sejak

tahun lalu 2021 ia aktif mengajak masyarakat untuk menyuarakan keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan. Bersama beberapa temannya ia mendirikan AMGM atau



Yepta Diharja foto .Facebook

dikenal dengan Aliansi Masyarakat Gunung Mas, yang gigih menyuarakan tuntutan masyarakat. Tidak hanya tingkat desa, ia juga mengorganisir warga Gunung Mas untuk menyampaikan tuntutan sampai ke tingkat Provinsi, melalui Gubernur dan DPR propinsi. Perjuangan Yepta dalam

beberapa kesempatan telah memperlihatkan perkembangan yang berarti. Perhatian Bupati dan beberapa Dinas yang membidangi perhubungan jalan ruas Palangka raya—Kuala Kurun sudah memberikan perhatian dan aksi yang nyata. “Saya memimpin Aliansi Masyarakat Gunung Mas secara spontan, agar ada yang memimpin, mengorganisasikan dan lain-lain” ujar Yepta. Ia mudah dihubungi dan sampai saat ini masih memberikan waktu untuk mengawal tuntutan masyarakat agar PBS – Perusahaan Besar Sawasta tidak boleh melewati jalan raya yang adalah milik pengguna umum. Ia getol meminta perusahaan untuk membuat jalan produksi sendiri baik itu perusahawan kayu, sawit dan batubara mesti punya jalan sendiri yang terpisah dari jalan umum yang sering dilalui masyarakat. Selamat bertugas melayani mengawal tuntutan masyarakat.

Editor : YJ



KONDISI JALAN UMUM PALANGKA RAYA - KUALA KURUN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berikut ini adalah ilustrasi pengguna jalan Palangka Raya – Kuala Kurun. Selain sepeda motor, kendaraan pribadi, kendaraan umum, dan kendaraan perusahaan swasta melewati jalan ini setiap harinya.



Truk
Perusahaan
Batu Bara



Truk
Perusahaan
Kelapa Sawit



Truk
Perusahaan
Kayu



Tim Panutung Tarung mendapatkan beberapa titik lokasi kondisi jalan rusak, beberapa sudah diperbaiki dengan ditimbun, kondisi ini belum memberikan rasa aman kepada pengguna jalan (masyarakat) seperti ketika dimusim kemarau menjadi berdebu, ketika hujan akan menjadi genangan air apalagi kendaraan-kendaraan perusahaan besar swasta beroperasi setiap harinya.

Berdasarkan survei lapangan yang dilakukan tim pada 10-12 Maret 2022, beberapa desa seperti Pematang Limau, Rangan Tate, Tanjung Karitak, dan Tumbang Empas terdapat berapa titik lubang dan medan yang naik turun mengharuskan untuk bergantian melewati jalur tersebut, terutama pada akhir pekan.

Jalan Kuala Kurun – Palangka Raya rusak salah siapa ?

DOKUMENTASI BIT

Pada tanggal 10-12 Maret 2022 tim panutung tarung berkunjung ke beberapa lokasi sepanjang jalan Palangka Raya - Kuala Kurun untuk mengetahui kondisi lalu lintas dan perkembangan perbaikan jalan yang dilakukan aliansi perusahaan besar swasta yang ada disana. Tim menemukan beberapa foto menarik dan mendokumentasikan melalui halaman ini.

Beberapa truk milik salah satu perusahaan besar swasta melintas jalan Palangka Raya - Kuala Kurun.

Berdasarkan spesifikasi truk Mercedes-Benz ini dengan panjang keseluruhan 6245 mm dan tinggi keseluruhan 2955 mm memiliki kapasitas kurang lebih 16 ton, sementara menurut aturan batas muatan di jalan umum adalah 8 ton. Truk ini beroperasi setiap hari.

12 maret 2022/foto BIT



Kondisi jalan yang sudah diperbaiki dengan mengandalkan penimbunan di musim kemarau menimbulkan debu yang terlihat seperti kabut asap. Tentu dampak debu tersebut mengganggu bagi pengguna jalan maupun masyarakat yang tinggal dipinggir-pinggir area tersebut seperti warung makan dan pemukiman.

29 Januari 2022/foto BIT

DOKUMENTASI BIT



Tumpukan batu bara dipinggir jalan arah Kuala Kurun menunjukkan bahwa kondisi jalan yang rusak menyulitkan kendaraan-kendaraan bermuatan hasil alam.

Selain kondisi jalan tentu batas muatan maksimal harus diperhatikan.

Tim panutung tarung juga menemukan kondisi yang sama di beberapa titik sepanjang di jalan Palangka Raya – Kuala Kurun

12 Maret 2022/foto BIT



Beberapa masyarakat lokal menimbun jalan berlubang dengan menggunakan tumpahan batu bara yang ada dipinggir jalan.

12 Maret 2022/foto .BIT



Spanduk kecil yang terpasang dipinggir jalan desa Rangan Tate terlihat dengan beberapa tulisan yang ditutup dengan cat.

10 Maret 2022/foto BIT

“PROYEK RAKSASA”

PEMBANGUNAN JALAN DI TANAH BORNEO

Mardijoyo

Kondisi jalan yang baik adalah faktor utama untuk ekspansi manusia, kolonisasi dan eksploitasi industri dari sebuah wilayah yang kaya akan sumber daya alam tetapi masih jarang penduduknya, seperti di Kalimantan Tengah, yang mana masih mewadahi keaslian hutan yang tersisa di Indonesia. Jalan dapat menjadi berkat tetapi juga kutukan yang tragis, karena jalan akan memfasilitasi komunikasi dan perdagangan masyarakat yang dapat mengganggu keseimbangan tanah, mengubah mata pencaharian penduduk asli untuk selamanya, dan membahayakan keberadaan jutaan hewan penghuninya. Tanpa disengaja, salah satu prioritas penjajahan Belanda setelah 1900 adalah untuk mengembangkan konektivitas jalan beraspal (sepanjang 12.000 km di tahun 1950), jalan berkerikil (16.000 km), jalur kereta api (41.000 km) dan jembatan untuk memfasilitasi mereka dalam mengeksploitasi sumber daya alam ‘Hindia Belanda’ secara bebas, begitu juga untuk memperkuat kontrol militer mereka. Pemerintahan Jokowi telah bertaruh secara besar-besaran untuk infrastruktur jalan melalui rencana ambisius Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), seperti yang sedang dibangun di



Ilustrasi dana pembangunan di Kalimantan Timur/foto cnbcindonesia.com

Kalimantan Timur, untuk menghubungkan Balikpapan menuju Samarinda (BALSAM), yang mana akan membantu Ibu Kota Negara (IKN) baru. Kementerian yang berkaitan telah mengetahui bahwa mereka tidak akan mampu menutup seluruh biaya, mengandalkan APBN sebagai satu-satunya sumber, dan inilah mengapa mereka menekankan pentingnya kemitraan dengan pihak swasta (PPP – Public Private Partnerships) melalui skema yang ditawarkan oleh BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), yaitu sebuah kerjasama pendanaan dengan investor swasta. Meskipun mekanismenya begini, tidak akan cukup. Oleh karena itu beberapa perusahaan swasta sekarang secara terbuka meminta bantuan dan keuntungan jangka panjang yang berpotensi tinggi untuk memberi bantuan kepada Negara. Pemerintah pusat dan Gubernur provinsi yakin bahwa semua jalan baru ini akan menuju bertambahnya pembangunan, tetapi para

politisi juga pasti paham bahwa setiap jalan besar selalu mengarah pada pembuatan jaringan jalan yang lebih kecil, seringkali tidak direncanakan dan



Jalan Tol Balikpapan - Samarinda (Balsam)

tidak sah, terkadang secara pribadi dan diam-diam dibangun oleh otoritas lokal, perusahaan dan kontraktor tanpa mendapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

yang dipersyaratkan. Ini seringkali terjadi di Indonesia pada masa lalu, dan sayangnya terus berlanjut, terlepas dari undang-undang yang telah disetujui Parlemen. Benturan kepentingan di antara politisi lokal dan pengusaha seringkali memperburuk situasi dan menjadi salah satu alasan kenapa para pelanggar tidak dihukum, seperti yang dikeluhkan dan dikecam oleh banyak kelompok masyarakat lokal. Baru-baru ini, terbukti kasus masalah-masalah ini telah terjadi di Jawa, Sumatra, Aceh dan Papua, tetapi daftarnya bisa lebih panjang. Mengingat latar belakang penegakan hukum yang longgar ini, wajar untuk menyatakan keprihatinan tentang proyek raksasa jalan, karena setelah selesai akan secara langsung mempengaruhi Kalteng dengan jalan Raya Trans Kalimantan yang memiliki sistem tiga jalan raya besar yang akan memperlancar



foto Kompas.com

perdagangan internal dan meningkatkan komunikasi antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, yang mana siap untuk menembus Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo), membuka pintu

air ke segudang kasus lokal konflik lahan, pembalakkan liar dan kesepakatan bisnis yang suram di antara otoritas lokal yang tidak bermoral dan berkepentingan profit pribadi. Sistem jalan baru ini pastinya akan mengubah keseluruhan



Jalan rusak dan posisi pada tanjakan membuat antrian kendaraan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah/11 Maret 2022/foto BIT

wajah dari Pulau kita, dan belum tentu menjadi lebih baik. Pertanyaannya, "Siapa yang akan membayarnya?" untuk semua jalan-jalan ini dan pemeliharaannya yang relevan. Pemerintah dan otoritas lokal tampak sangat membutuhkan pendanaan alternatif, setidaknya pekerjaan yang penting diabaikan demi dana, dan kita tahu bahwa di negara berkembang manapun, seorang politisi sangat putus asa mencari uang yang sering digunakan untuk melanggar dan memihak investor swasta terhadap kepentingan publik, khususnya kepentingan masyarakat lokal. Kekurangan dana, seringkali menjadi alasan kurangnya kualitas, keberatan, penggunaan di luar regulasi, di samping adanya bencana alam yang merusak jalan dan membutuhkan perbaikan. Kita melihat contohnya seperti jalan Tjilik Riwut menuju kecamatan Manuhing

Raya dimana pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan diperlukan di setiap musim hujan, dan selalu menjadi masalah permanen untuk orang lokal dan juga truk kelapa sawit dan kayu, yang menjadi pengguna utama

jalan. Teknisi yang baik, peralatan berat, pekerjaanya, kualitas kerikil dan aspal serta tepian jalan yang dibangun dengan baik adalah hal paling penting walaupun ada harganya. Inilah kenapa merencanakan jalan baru perlu mengikuti prosedur yang ketat, juga keterlibatan permanen dari berbagai level otoritas Nasional, provinsi dan daerah yang mana sudah tertuang dalam hukum Indonesia dengan melakukan survei, kontrol, penegakkan hukum dan aturannya, yang sering dilanggar oleh seseorang dan perusahaan yang memakai jalan. Kasus truk perusahaan-perusahaan yang ada di Gunung Mas mengangkut muatan berat lebih dari ketentuan yang berlaku adalah contoh yang menyolok dan secara luas dilaporkan dalam bagian lainnya di terbitan Panutung Tarung ini.

Editor : YJ



KERUSAKAN JALAN: ANTARA **PENEGAKAN ATURAN** DAN **MAIN MATA**

Destano Anugrahnu

Ketentuan pasal 19 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kelas jalan sudah sangat jelas, pembagian klasifikasi kelas dalam muatan sumbu terberat (MTS) jalan juga sangat rinci bahkan sampai pada diameter dan panjang kendaraan bermotor yang diperbolehkan melintas untuk kriteria atau kelas jalan tersebut sudah pula dijelaskan. Lebih detailnya Pasal 19 ayat 2 huruf a-d menerangkan sebagai berikut:

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan

Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

- d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Lantas jika demikian tentu membawa kita pada banyak pertanyaannya salah satunya yakni, kenapa jalan yang ada khususnya lintas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya nampak terus mengalami kerusakan dan pada siapa kewenangan dalam perbaikannya?, dilansir dari Antara, Sabtu 9 Oktober 2021, Kapolres Gunung Mas AKBP Irwansah melalui Kasat Lantas AKP Azmi Halim Permana, mengatakan, bahwa jalan Kuala Kurun-Palangka Raya hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2,1 meter, panjang tidak melebihi 9 meter, ukuran paling tinggi 3,5 meter, dan muatan sumbu terberat (MST)/tonase maksimal 8 ton. "Status ruas jalan Kuala

Kurun-Palangka Raya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah tipe jalan kelas III C," katanya. Berdasarkan beberapa literatur, penelusuran dan referensi yang penulis temukan untuk wilayah Petuk Litik menuju Kuala Kurun itu merupakan ruas jalan provinsi, sehingga pemprov mempunyai kewenangan untuk penanganannya, memang berdasarkan keterangan dari Kadis PUPR pada Media Antara (6/12/2021), pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalokasi dana sebesar 160 milyar untuk perbaikan jalan bukit liti-bawan, bawan-kuala kurun, linau-tumbang jatuh. Tentu sebuah kabar yang memberikan pengharapan, meski sampai per hari ini belum ada tanda-tanda realisasi atau proses lelangnya sudah dilaksanakan atau tidak, masih belum ada kabar yang pasti. Akan tetapi ada yang menarik dikala beredarnya video pendek pada berbagai platform media sosial pada tanggal 29 januari 2022 yang lalu, dimana pada video tersebut nampak Bupati Kabupaten Gunung Mas, Jaya S. Monong sedang melakukan sidak atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan log PT. Hutan Produksi Lestari, sebuah kemarahan yang sangat wajar tentunya oleh seorang kepala daerah, jika mengingat dampak yang terjadi akibat aktivitas korporasi tersebut membuat terganggunya aktivitas masyarakat dan



Rambu disekitar jalan Palangka Raya – Kuala Kurun tentang aturan maksimal muatan 8 ton dicoret menjadi 80 ton/1 Januari 2022/foto BIT

menyebabkan potensi tingginya kecelakaan di ruas-ruas jalan yang dilalui para konstituen yang menitipkan amanah kepada sang kepala daerah tersebut. Akan tetapi berdasarkan penelusuran tim Borneo Institute pada 7 Januari 2022 saat melintas ruas jalan Kuala Kurun–Palangka Raya menemukan fakta mengejutkan yang nampak bertolak belakang dari amuk dan amarah sang Bupati, hal demikian karena pada saat melintas tepatnya pada wilayah administratif daerah desa Rangan Tate sampai dengan Pematang Limau ada cukup banyak truck dump yang mengangkut batubara, bahkan tanpa sungkan nampaknya ada beberapa angkutan tersebut mengangkut dengan bak terbuka tanpa penutup yang membuat serpihan kecil dan abu dari jenis batuan dengan julukan emas hitam itu tercecer tak terelakkan. Temuan penulis dari berbagai referensi menyebutkan jika setidaknya akhir-akhir ini ada tiga (3) perusahaan pertambangan yang aktif beroperasi dan di beberapa pemberitaan media online mencoba memberikan

perhatiannya atas beberapa kerusakan ruas jalan Kuala Kurun–Palangka Raya, perusahaan tersebut yakni: PT. Dayak Membangun Pratama (DMP), PT. Tadjahan Antang Mineral (TAM), PT. Sembilan Tiga Perdana (STP), hanya masih belum di pastikan angkutan yang tim Borneo Institute pada 7 Januari 2022 angkutan milik perusahaan yang mana dan tentu perlu penelusuran yang lebih mendalam lagi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan besar dari penulisan ini yakni kenapa nampak ada pembiaran pada aktivitas kegiatan usaha tertentu (baca: pertambangan batubara) pada ruas jalan Kuala Kurun–Palangka Raya, sementara berdasarkan ketentuan perundang-undangan aktivitas usaha tersebut juga berpotensi melakukan pelanggaran yang sama dengan amuk dan amarah sang Bupati. Apakah karena ada elit atau petinggi yang melakukan back up atas salah satu kegiatan usaha pertambangan ini sehingga ada perbedaan perlakuan atas aktivitas usaha PBS ini? Atau apakah kemarahan sebelumnya dalam sidang

sang Bupati hanya sandiwara didepan media? dan atau-atau pertanyaan lainnya lagi yang membuat kita pada sebuah kebingungan, fakta dan realita tersebut pun pada akhirnya membuat kabar telah dialokasikannya dana 160 milyar oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah untuk perbaikan ruas jalan Kuala Kurun–Palangka Raya nampak tidak terlalu menggembirakan, karena sepertinya ada potensi dusta dan sandiwara dalam penegakan hukum saat dilakukannya penegakan hukum dan kebijakan terkait jalan ruas jalan Kuala Kurun–Palangka Raya ini, karena sekalipun kelak direalisasi perbaikan tersebut jika ada pembedaan perlakuan (baca: anak emas dan anak tiri) pada masing-masing kegiatan usaha, maka kerusakan pada masa yang datang juga terus mendapat permakluman, sungguh sebuah siklus, fakta dan realita yang ironi terjadi di Negeri ini. Sekian & terimakasih.

Editor : YJ



HIDUP SEGAN MATI TAK MAU, SETELAH SETAHUN FOOD ESTATE, BATANG SINGKONG TUMBUH SELUTUT DI TANAH GRANIT BERKERIKIL

Pebri dan Rama

Matahari terik, barisan potongan awan tak mampu menutup sinarnya yang menghujam 600 hektar kawasan kebun singkong proyek Food Estate (FE) di desa Tewai Baru. Sudah setahun singkong ditanam oleh tentara di tanah pasir dan berbatu kerikil. Pohon singkong tumbuh kurus, dan daunnya lebih banyak berwarna kuning ketimbang hijau. Beberapa orang tentara memanen ubi singkong yang tumbuh tipis dan kurus pada balur G9 dan G4. Warga Tewai Baru yang tanahnya bersebelahan dengan Kawasan FE juga sebagian beberapa kilo hasil panen. Sejurus kemudian warga mengupas ubi singkong itu, mereka iris tipis-tipis. "Saya coba berikan singkong food estate kepada ayam, ternyata tidak dimakan, aneh, biasanya kalau singkong asli dari desa pasti sangat disukai ayam" Ujar NNI, 51 tahun perempuan paruh baya. NNI tak kuasa menahan rasa khawatir yang terpancar lewat nada bicaranya yang terbata-bata, ia meneruskan ceritanya. "Daun singkongnya juga keras, sangat berbeda dengan singkong lokal, saya pernah merebus daun singkong food estate, ketika mendidih air berubah warna jadi hitam, kami takut memakannya"

NNi tidak terlalu heran jika singkong yang ditanam tentara tidak tumbuh normal. "Mereka menanam di atas balur, sungguh berbeda dengan cara kami dayak Ngaju Disini, kami membuat lubang tanam cukup dalam, tapi singkong tentara tidak membuat lobang" Menutupi obrolannya NNI, menambahkan "Tentara yang ada di lokasi food estate sekarang ini, ada yang datang melihat tempat ini, terhubung

klaim dan janji Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo. "Komoditi singkong dipilih untuk mendukung program cadangan pangan strategis nasional, karena singkong bisa menghasilkan sekian banyak turunan seperti mie, tapioka dan mocaf," kata Prabowo saat meninjau lokasi pengembangan singkong di Desa Tewai Baru, Kecamatan Sepang, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu, 10 Maret 2021. Sementara itu beberapa ratus meter dari tanah milik NNI terdapat petani yang bernama Bapa Debi, 53 tahun. Ia berkebun dan bekerja mendulang pasir zircon (puya) serta emas di sekitar desa Tewai baru. Ia mengatakan "Sebelum food estate menggusur tanah kami di Tewai Baru, dulunya tanaman kami antara lain mentimun batu, bawang suna (bawang Dayak), jahe dan beberapa pohon karet. Bercocok tanam jenis yang saya sebut tadi sebenarnya sangatlah cocok di lahan food estate yang dikerjakan



Kondisi bangunan Kamar mandi dan toilet yang ada didalam kawasan food estate/9 Maret 2022/foto BIT

tidak ada lagi penanaman singkong, biasanya untuk mengisi waktu para tentara memancing ikan di sekitar sungai terdekat". Fakta yang NNI ceritakan kepada majalah Panutung Tarung sungguh berbeda dari

sekarang. Kami mengerjakan lahan di Tewai Baru, berkebun sejak tahun 1989 sembari kami berkerja mendulang emas, untuk menjalani kehidupan." Bapa Debi menyatakan



Pasir dan batu kerikil diantara pohon singkong di lahan seluas 600 hektar/9 Maret 2022/foto BIT

kekesalannya dengan proyek singkong, “Tanaman kami digusur menggunakan ekskavator, tanpa berkompromi dengan kami. Padahal kami sedang bekerja di kebun kami sendiri”. Tahun lalu (2021) Saya mengira lokasi food estate itu bukan di Tewai Baru, nggak taunya di tempat kami sini. Sebenarnya kami hendak menolak, tapi kami tidak tau caranya. Bapa Debi terus berkomentar, lebih lanjut ia mengatakan “Apabila hujan lebat, di tempat kami ini tenggelam semua, gara gara proyek singkong ini—padahal dulunya sungai Tambun tidak pernah sampai menenggelamkan rumah warga, jalan raya pun dulunya tidak pernah banjir, tapi sejak food estate datang, jalan raya pun banjir”. Warga desa yang lahannya tergusur proyek singkong FE tidak mendapatkan penjelasan yang memadai,

kemana harus melapor, seperti apa solusinya, semua tidak jelas, warga masyarakat bagaikan yatim piatu yang tak tahu kemana lagi harus mengadu. Panutung Tarung meminta kesediaan wawancara dengan Letkol Inf. Johan Sitompul yang bertanggung jawab menangani food estate singkong Kemenhan, namun ia tidak kepingin menjawab pertanyaan yang diajukan. Surat permohonan wawancara tidak memperoleh jawaban dari Sitompul Akhir maret lalu, Berkat (49 th) Sekretaris desa Sepang Kota mengatakan “Terdapat 200an kepala keluarga yang tanahnya terkena proyek food estate, tiap kepala keluarga itu memiliki luasan tanah berkisaran antara 3-4 Ha”. Dengan lugas ia menambahkan “Kami tidak setuju tanah yang telah tumbuh pohon karet koq sekarang diubah jadi proyek

singkong. Area itu dulunya proyek tanaman karet yang dibiayai pemerintah pada zaman presiden Soeharto, dulu orang senang menanam karet karena harga jualnya tinggi”.

Keadaan tambah runyam, karena beredar kabar tidak ada ganti rugi dari pemerintah pusat untuk lahan masyarakat yang tumpang tindih area Food Estate. Beberapa warga desa telah melapor kepada Sigo, Kades Tewai Baru mengenai tanah mereka yang tergusur lahan singkong FE. Sigo, sigap melanjutkan laporan warga itu langsung ke Bupati, “Sudah saya laporkan kepada pak Bupati langsung November lalu, ada dua warga yang melaporkan tanahnya terkena lahan proyek singkong, kami menginginkan kejelasan dari Bupati” Seingat Sigo setidaknya pada 2021 sudah tiga kali di desa Tampelas pertemuan antara Bupati dengan empat desa yang terkena FE, pemerintah pusat juga diundang serta tak lupa tokoh masyarakat seta mantir tetua adat Menurut perhitungan Sigo sampai tahun 2022 sudah ada empat keluarga yang tanahnya terkena gusuran FE yang telah merabas hutan seluas enam ratus hektar. “Padahal dulu katanya, Pihak Kemenhan menyatakan, kalau proyek FE itu terkena milik masyarakat, masyarakat bisa bermitra dengan Kemenhan”. Panutung Tarung melihat dari dekat tanaman singkong FE, pada akhir Maret lalu, singkong tumbuh sekedarnya, hidup segan mati tak mau.

Editor : YJ



DOKUMENTASI BIT

Berdasarkan pada dua edisi sebelumnya majalah panutung tarung terus berfokus untuk melihat kondisi food estate di Kabupaten Gunung Mas pada kesempatan kali ini juga meliput berita perkembangan situasi yang ada disana dengan area seluas 600 hektar berisikan tanaman singkong dan beberapa bangunan serta alat berat yang digunakan. Berikut adalah dokumentasi yang berhasil tim dapatkan.



Foto disamping kiri ini menunjukkan tempat untuk bahan bakar yang digunakan selama operasional di area food estate yang tergeletak begitu saja.

Pembukaan lahan yang besar disana tentu memiliki dampak yang besar terutama terhadap lingkungan, apakah semua itu sudah sepadan ?

9 Maret 2022/ foto .BIT



Singkong yang ditanam pada area food estate yang berumur kurang lebih 1 tahun

9 Maret 2022/foto .BIT



Salah satu tim panutung tarung melihat kondisi singkong yang ada di area food estate.

9 Maret 2022/foto BIT

DOKUMENTASI BIT



Bangunan-bangunan baru ini berada di lokasi area food estate seperti kamar mandi, toilet dan beberapa rumah yang nantinya akan dijadikan tempat tinggal untuk pengelolaan proyek ini.

Sayangnya dengan infrastruktur yang disediakan belum sebanding dengan hasil tanaman singkong yang tumbuh setinggi lutut.

9 Maret 2022/foto BIT

Alat berat dan bahan material seperti besi berada di lokasi tak jauh dari kebun singkong.

9 Maret 2022/foto BIT



Foto kondisi lahan yang ditanami singkong tampak kurang terawat dengan baik, hal ini terlihat dari bentuknya yang masih kecil dan panjang batang hanya sebatas lutut orang dewasa.

Proyek nasional ini mengucurkan dana yang sangat besar, melihat fakta-fakta yang ada di lapangan kami merasa proyek ini akan gagal.

9 Maret 2022/foto BIT





Tugu wilayah desa Sumur Mas/foto .BIT

GONTA GANTI PERUSAHAAN TAMBANG DI SUMUR MAS SEJAK KOLONIAL HINGGA MASA KINI

Rodi, Luthfi, Didik, Sukir

Sejak ratusan tahun lalu desa Sumur Mas di Kabupaten Gunung Mas sudah memiliki daya tarik bagi pemburu emas dari berbagai negara. Setidaknya dua negara mengincar potensi emas yang terkandung di bumi Borneo. Sejak tahun 1890 an Belanda kemudian disusul Jepang awal tahun 1940 an. Tatkala Indonesia telah merdeka pun berburu emas di kawasan desa Sumur Mas masih riuh hingga kini. Tak kurang dari enam perusahaan tambang serta perusahaan kayu telah beroperasi di kawasan tersebut.

Tidak mudah perjalanan menuju sumur mas, jalan berbukit turun naik, kerikil campur pasir melapisi jalan yang aspalnya sudah

terkikis. Seorang pengemudi yang berpengalaman pun melambatkan laju kendaraan agar tak tergelincir ke jurang kiri dan kanan yang dalam dan terjal.

“Nama kampung ini dulunya Gunung Mas, itu dulunya Tumbang Mentuh, kemudian berubah menjadi desa Sumur Mas. Sesungguhnya desa inilah yang menjadi cikal bakal penamaan kabupaten Gunung Mas. Dulu Gunung Mas sekarang Sumur Mas”, Ujar Diman Jader, pria berusia 50 tahun, panggilan akrab sehari-hari kerap dipanggil sebagai Bapak Hera, ia saat ini sebagai kepala desa Sumur Mas.

“Berdasarkan ingatan saya semasa kecil, 1981 atau 1982 barulah terucapkan nama desa Sumur Mas, yang pertama kali mengusulkan

nama Sumur Mas adalah Mochamad Adenan, yang saat itu Bupati Kapuas.” Jader menambahkan.

Desa sumur Mas diapit oleh Dusun Gudang Setengah dan desa Tumbang Mentuh. desa Tumbang Mentuh.

Sore itu kami melanjutkan perjalanan ke Dusun Gudang Setengah mendatangi Dihel Lesa, Bapa Cia, 50 tahun. Sewaktu kami bertandang, dia sedang menggergaji papan ulin, mengerjakan lantai rumah kayu berbentuk mini betang. Dihel tukang kayu tradisional yang tangkas dan gesit. Kami bertanya kepada Dihel kenapa dusun ini disebut Gudang Setengah? “Karena dulunya, tempat itu sebagai gudang menyimpan alat logistik pertambangan Jepang, penamaan dusun terkait sejarahnya sebagai tempat logistik dan alat-alat tambang seperti dinamit, rel, cangkul sekop dan lain-lain.” Ujar Dihel

Dihel menjelaskan kepada kami bahwa tersiar luas cerita bagi penduduk Sumur Mas bahwa seputar anak sungai Jalungen diduga terdapat kuburan yang diduga kubur pekerja tambang semasa Belanda maupun Jepang. Pemerintah Belanda semasa penjajahan menamakan salah satu Goa pada kawasan tambang tersebut sebagai Goa Wilhelmina. Sampai Indonesia merdeka pun di desa Sumur Mas sudah tersiar luas cerita tentang Goa wilhelmina. Dari berbagai sumber disebutkan Wilhelmina adalah Ratu yang memimpin kerajaan belanda dari masa 1890 sampai 1948. Cerita tentang Goa Wilhelmina juga kami tanyakan kepada dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Gunung Mas. Frion salah seorang staff fungsional Pelestari cagar budaya. “Terdapat Lima Periode pengelolaan Tambang Mas Wilhemina dari periode ke periode, pertama Belanda melalui Orange Nassau Company, Kedua Jepang, Ketiga era pengelolaan masyarakat

juru pelihara yang kami tempatkan pada obyek Cagar Budaya.” Selanjutnya Panutung Tarung, meminta konfirmasi terkait keberadaan PT. Alam Sutera yang saat ini berkegiatan di Sumur Mas. Kami menemui Edward, yang saat itu mewakili perusahaan. Kami berbincang di camp yang

siapapun yang mengusik cerobong dan pipa peninggalan perusahaan kolonial itu. Mendekati akhir perbincangan kami, ia menginformasikan di sekitar Cerobong dan gua Wilhelmina banyak lahan masyarakat berupa Kebun Karet, sebagian masyarakat



Tim Panutung Tarung berkunjung ke PT. Alam Sutera dengan kades Sumur Mas/11 Maret 2022/foto BIT

dayak, Keempat era Kintaro dan Kelima era PT. Tewah Perkasa dan terakhir perusahaan PT. Alam Sutera”. Kami juga sempat menemui Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, Yudi Dharma, ia mengatakan: “Benda-benda yang diduga cagar budaya di Gunung Mas itu banyak, untuk sejarah dan budaya yaitu melakukan registrasi data Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya, Melakukan pencatatan, pendokumentasian dan pelestarian. Kami sudah menempatkan 14

mereka bangun di desa Sumur Mas. “Saya pastikan Perusahaan PT. Alam Sutera tidak akan mengganggu dan merusak wilayah cerobong dan gua Wilhelmina, kami akan tetap menjaga keutuhannya. Kalo sampai kami merusak pipa cerobong tambang peninggalan Belanda itu, pasti perusahaan kami akan menghadapi masalah”. Pihak Desa melalui kepala desa Diman Jader cukup gigih menghimbau agar warga desa memelihara kawasan Tambang Mas Wilhelmina, tak henti-hentinya ia melarang

juga menambang emas tradisional, tetapi mereka tidak mengganggu atau merusak cerobong atau gua Wilhemina tersebut. Pada ujung perbincangannya Diman mengatakan “Pemerintah desa dan masyarakat Sumur Mas berharap area sekitar Goa Wilhelmina dapat segera ditetapkan sebagai Cagar Budaya, agar pengelolaan tempat itu makin jelas dan mendapat perhatian dari pemerintah kab. Gunung Mas”

Editor : YJ



BAKAL CAGAR BUDAYA TAMBANG MAS PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG GOA WILHELMINA DI DESA SUMUR MAS

Rodi, Luthfi, Didik

Siang itu Panutung Tarung bertandang ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kuala Kurun. Menjumpai Yudi Darma, 40 tahun, ia bertugas menangani Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Permuseuman, dan Registrasi Data.

Apakah dari dinas pariwisata sudah mengetahui adanya peninggalan sejarah berupa cerobong penambangan emas (peninggalan Belanda) di desa sumur mas ?

Kami juga melakukan registrasi pada area yang diduga cagar budaya, yang di Sumur mas itu masih belum tuntas dan itu belum kami masukkan registrasi nasional, karena kami melakukan ukuran kawasan dan menggali benda-benda yang ada di kawasan itu, belum lagi jika kami masuk ke dalam.

Menurut masyarakat masih banyak peninggalan Belanda. Dimana peran dinas pariwisata dalam mengelola dan menjaga cagar budaya serta situs sejarah di Desa Sumur mas ?

Peran dinas yaitu melakukan pencatatan, registrasi, penetapan kawasan menjadi kawasan cagar budaya untuk dapat dilakukan zonasi. Karena area itu masih dalam

kategori diduga ada cagar budaya didalamnya, itu yang masih kami explore, memang secara naratif bisa dikatakan cagar budaya, tapi kami memiliki prosedur khusus sehingga bisa ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya. Jadi pertama

Melakukan pengembangan Kawasan cagar budaya agar dapat dilakukan pemanfaatan lebih lanjut, misalnya untuk dijadikan destinasi objek wisata budaya. Melaksanakan tindakan pelestarian Kawasan cagar



Yudi Darma (Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Mas) menjawab beberapa pertanyaan dari tim panutung tarung, Kamis (10 Maret 2022) foto dok.BIT

melakukan registrasi, pencatatan dan pemetaan. Mengarahnya ke penetapan cagar budaya, kemudian pelestarian dan kemudian pengembangan.

budaya. Data-data dan titik koordinat masih belum bisa di publikasikan atau diperlihatkan dikarenakan data masih kurang dan masih dalam pengendalian



Jembatan Batu Mahasur di Kabupaten Gunung Mas menjadi salah satu ikon kabupaten tersebut foto dok.google.com

lebih mendalam terkait Goa Wilhelmina.

Apa saja program dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2022-2023 tentang sejarah dan budaya di wilayah kab. Gunung mas ?

budaya yaitu melakukan registrasi data Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya, melakukan pencatatan, pendokumentasian dan pelestarian. Kami sudah menempatkan

karena kami tidak mungkin mampu menjaga semua objek yang ada. Dengan berbagai ancaman serta pencurian dan sebagainya. Dengan dana yang terbatas kami hanya menyimpan data. Kami juga tidak bisa fokus pada satu tempat, misal pada objek lain terjadi proses penggalian oleh orang lain dll.

Kami juga melakukan Tindakan pengamanan Cagar Budaya, Sampai saat ini terdapat 60 antrian register cagar budaya di dalam wilayah kab. Gunung Mas. Katanya yang terkait goa Wilhelmina ada 3 atau 4 desa sebagai Sumur Mas, Tewah, Upun Batu, Tumbang Habaon dan Batu Nyiwuh. Karena pekerjaanya dari 6 desa itu. Data Kami mengukur cerobong, dimensi tinggi panjang dan lebar saja.

Editor : YJ



Tim Panutung Tarung berdiskusi tentang cagar budaya di Kabupaten Gunung Mas, Kamis (11 Maret 2022) foto dok.BIT

Program yang sudah dan akan dilaksanakan pada tahun 2022-2024, benda-benda yang diduga cagar budaya di Gunung Mas itu banyak, untuk sejarah dan

14 juru pelihara yang kami tempatkan pada obyek Cagar Budaya. Kami mengolah data secara digital, membangun data base Cagar Budaya---





Pasah Harati yang terletak di desa Tumbang Samui, Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas/foto BIT

PASAH HARATI EKA MAINGKES BINYI HASIEN

Ary Prasetyo

Kikik-kakak tatawen uluh are mananture tuntang manampayah ampin karamin acara. Tege je mangarungut, baderer tuntang manasay. Sukup simpan ampin kare penampilan te. Metuh lasut andau tempak hunjun kuluk, Sabtu 20 November 2021 ikey manampa acara peresmian Pasah Harati.

Pambakal 5 kalewu uras dumah, kalote kea je bagare Camat Manuhing Raya tege kea, sawae gin umba hadir. Kakare artis sahapus lewu muhun uras. Uluh are paham hanjak, pik-pak auh tapuk lukap uluh are.

Borneo Institute mamangun ije pasah, je inyewut ikey iyete Pasah Harati. Imangun hung lewu Tumbang Samui,

Kecamatan Manuhing Raya, Kabupaten Gunung Mas. Acara peresmian pasah tuh mahapan cara hadat itah Dayak Ngaju. Akan BIT peresmian Pasah Harati puna paham hanjak tuntang are manyewut syukur tagal pandohop uluh are. Terutama je bara anggota Kelompok Pamalan (Kelompok Tani). Acara Adat peresmian Pasah Harati te inampara dengan balaku asi tuntang berkat bara Hatala, uka tiruk tuntang tintun Pasah Harati jituh ulih ilalus.

Kakueh ampin tintun pasah harati jituh? Hung pasah harati tuh ikey mangumpul binyi tuntang paung kabun kambulan itah Dayak. Ije mambatang gawi hung pasah harati tuh iyete eka

mamingkes binyi. Ikey mimbit kakare mina, mama tuntang kawan tabela je manetep hung lewu uka manggau tuntang mangumpul binyi hasien atawa je pangkaandal tuntang pangkatamam ah. Itah jadi mananture bahwa harian andau itah tuh pasti perlu je bagare binyi. Are uluh pamalan bahali manggau binyi tuntang paung je handak i-imbul. Handak ih ewen maharagu petak tuntang mamalan, tapi tapas binyi ah. Saruruy dengan te kea, Uluh Itah are balang maharagu petak eka malan, awi ngahana pemerintah manusul petak atawa manyeha petak. Tagal te, ikey mangkeme perlu angkat ah itah balajar haya-hayak. Narai je nguan

ikey hung pasah harati wayah tuh? Ikey babagi pangatawan tuntang tiruk pikir dengan kare kakawalan tunda pahari hung lewu. Ikey balajar mambasa tuntang balajar kea bahitung, bareken ampin kamiar pamalan hung lewu.

Eweh bewey pamalan je tege tiruk handak malan hung petak danum itah hung Kalteng tuh, perlu iye barima kenampi mandinun binyi. Uluh Dayak tuh sapuna ah tamam dan are kea pangatawa takait jenis parei tuntang

kakare macam binyi kabun kambulan.

Narai guna kakare binyi tuntang paung je ingkes ikey hung Pasah Harati tuh?

Are bewey je tau itah manduan guna tuntang hasil ah. Awi itah jadi manampayah wayah tuh jadi jahay uluh itah lewu je maingkes binyi tuntang paung.

Are uluh jake—maimbul parei. Katika ewen manggetem hamben te kea lepa parei



Benih lokal milik masyarakat yang disimpan di Pasah Harati/foto BIT

pamalan tuh je paham baguna. Pandak sarita iye te itah pamalan maina binyi hung “Pasah Harati” limbah te metuh ewen sampai katika perlu binyi je akan i-nandang atawa i-imbul, ewen tau manalisih atawa manduan helu hung pasah harati te. Amun jatun uluh je maharagu petak danum Uluh Dayak tuh ngahus ih je kare katatau tuntang cukup simpan binyi tuh. Sala-sala anak jarian itah harian andau tau

je timben je marima tutu-tutu handalem takait taluh je imbasa ah.

Rumah Literasi inampa uka tau mampadehen tuntang mamparendeng puat dengan kakare ka-apik pamalan maharagu petak danum. Saruruy kea dengan pamalan je pintar tuntang harati manulis, mambasa tuntang bapander.

Kesimpulan takait literasi tuh tege tarait kea dengan pamalan je apik tuntang paceh mambasa, manulis, bapander, bahitung tuntang bareken.

Eweh bewey pamalan je tame literasi tingkat je hunjun hung ngambu, te iye ulih tuntang sanggup, uka-malalus taluh gawie, tagal te kea iye apik manaharep ampin kakare cukup macam masalah je naharep hung pambelum kalunen.

Tagal te kea kakare kelompok pamalan je tege hung lewu, has itah!, manggau ampin hila tuntang cara je cocok hung zaman wayah tuh. Miar haya-hayak hung pasah harati.

Tabe,

Editor : YJ



Kegiatan bersama kelompok tani dilakukan di teras pasah harati/foto BIT

ah jadi behas je uras akan kinan ih. Jatun batisa je ingkes akan binyi. Tau inyewut dengan istilah uluh wayah tuh benih langka atawa binyi je jadi jahay uluh manyundau ah. Binyi je ingkes ewen je

manaharep kapehe. Pasah Harati tuh ingguna kea akan huma Literasi, naray rimae je literasi? Jituh tatame bahasa uluh laut. Literasi te asal ah bara literature je arti te uluh je balajar mambasa



Halaman ini memberikan informasi beberapa tradisi kebudayaan masyarakat Dayak yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Manuhing Raya Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Informasi ini juga termuat di postingan Instagram Borneo Institute.

Ini adalah tradisi menarik lainnya dari Tumbang Mantuhe, salah satu desa dampingan BIT di Gunung Mas. Beberapa warga desa masih memasak secara tradisional dengan Panggitang, sebuah besi panjang yang diletakkan di atas 'kompor' yang mejanya terbuat dari tanah sebagai perapian. Terkadang, orang-orang menggunakan area di sekitar Panggitang sebagai penyimpanan benih karena dikatakan dapat mencegah kelembapan dan jamur.

Cek Instagram kami di:
borneoinstituteofficial



Orang kota dapat melihat nilai dan kesetaraan dalam keluarga tradisional Dayak yang berada di pedesaan, dimulai dari kehidupan di rumah mereka. Pendidikan dalam keluarga sangat penting untuk memperkuat karakter masyarakat. Di dalam keluarga tradisional Dayak, perempuan dan laki-laki secara umum memperlakukan satu sama lain dengan adil, karena mereka paham bahwa setiap peran dan pekerjaan sama pentingnya. Jika anak-anak melihat orang tua bekerja sama dengan harmonis, mereka akan meneruskan pemikiran dan nilai yang sama kepada generasi selanjutnya.

Bit

Borneo Institute

MARI PERKUAT LITERASI DENGAN MEMBACA

MAJALAH PANUTUNG TARUNG



Ayo ikuti majalah “Panutung Tarung” kami !!!

Tersedia versi online
melalui website BIT : <https://borneoinstitute.org>

Tersedia versi cetak
melalui kontak/Wa : 0858-4567-9209
melalui email : info@borneoinstitute.org

Ikuti juga media sosial kami :

Instagram : [borneoinstituteofficial](#)
twitter : [borneoinstitute](#)
Youtube : [Borneo Institute Official](#)
Facebook : [The Borneo Institute](#)



MARI PEDULI SAMPAH

"SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH MASIH BELUM BERKELANJUTAN"

